

BAB 4

Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Masalah utama yang mengganggu negara-negara pesisir dan Selat Malaka berkisar pada ketidakmampuan Indonesia dan Malaysia, khususnya, untuk berkolaborasi secara efisien satu sama lain dan Singapura. Lebih lanjut, Indonesia dan Malaysia telah berusaha untuk membatasi interaksi berskala internasional atau intervensi langsung oleh aktor diluar wilayah Asean, tidak seperti keinginan Singapura untuk membuka dialog bagi kekuatan asing. Namun, penting bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk mengamankan aparat keamanan di kawasan dan memaksimalkan kesempatan yang ada demi upaya memberantas permasalahan internasional yang menyinggung keselamatan navigasi kapal di wilayah selat malaka. Serta keamanan kedaulatan masingp masing negara.

Penting bagi peneliti dan pemerintah untuk memahami dasar-dasar masalah transnasional yang merugikan mempengaruhi lingkungan keamanan selat dari Malaka. Serangan bajak laut telah membawa perhatian negatif terhadap wilayah tersebut, sampai-sampai selat tersebut dikaitkan dengan perampokan bersenjata seperti di Somalia, reputasi kebebasan dan keamanan selat malaka telah tercoreng oleh kejahatan maritim.

Akhirnya permasalahan ekonomi menyebabkan serangkaian masalah, mulai dari masalah kesehatan hingga kerugian finansial yang luar biasa untuk semua sektor produk konsumen. Tiga negara pesisir Indonesia, Malaysia dan Singapura

telah memperkenalkan inisiatif sepihak, bilateral, trilateral dan ekstra-regional untuk memerangi ancaman ini. Beberapa dari mereka telah berhasil dan meminimalkan bahaya dari tiga bahaya besar ini. Namun, program lain terhenti karena kondisi yang sudah ada sebelumnya yang mencegah langkah apa pun menuju peningkatan keamanan.

4.2 Saran

Terlepas dari banyak kemunduran yang dialami Indonesia, Malaysia, dan Singapura selama bertahun-tahun, ancaman tersebut tampaknya telah berkurang secara keseluruhan. Pembajakan, misalnya, memuncak pada awal 2000-an. Jumlah insiden yang dilaporkan di dalam dan sekitar Selat telah menurun. Pemerintah Indonesia juga telah menangani pembajakan secara lebih efektif, dengan peningkatan kerjasama berbagi intelijen dan teknologi yang lebih baik. Tujuan positif mendorong pemerintah untuk bertindak dan menangkap oknum terkait, meningkatkan kapasitas negara dan keinginan untuk menghentikan tindakan kejahatan yang mengancam kebebasan navigasi.

Meskipun demikian, penting bagi aktor negara untuk melanjutkan upaya untuk memerangi bahaya ini untuk mencegah kembali peningkatan aktifitas perompakan di selat malaka. Seperti disebutkan sebelumnya, tidak adanya masalah tidak berarti permasalahannya telah selesai. Pada akhirnya, Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki cara untuk memerangi dampak dari ancaman transnasional yang bermasalah ini. Dialog multinasional yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembajakan sangat penting untuk dipertimbangkan oleh negara-negara pesisir guna meningkatkan kerja sama keamanan di masa depan.

Selain itu, membuka kawasan untuk bantuan asing terbatas dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif untuk menangani masalah ini. Namun, pembangunan ekonomi harus tetap menjadi prioritas utama dalam memerangi pembajakan. Sebagai akar penyebab banyak tindakan kriminal, ketidaksetaraan dan kemiskinan harus ditargetkan oleh pemerintah di wilayah tersebut dan cara-cara untuk meringankan kondisi ini harus segera diupayakan. Dengan populasi yang lebih makmur, lebih sedikit orang yang akan beralih ke pembajakan laut dan kegiatan ilegal untuk mendapatkan uang.

Terlepas dari pembahasan penelitian ini, penulis masih merasa banyak isu keamanan maritim yang dapat diulas dan dikaji lebih dalam maupun lebih secara keseluruhan. Daftar pekerjaan rumah yang dimiliki Indonesia dalam menangani wilayah lautnya masih banyak dan beragam, mengingat luas dan kompleksnya letak geografis Indonesia. Salah satu fokus keamanan yang dapat dilanjutkan adalah tentang keamanan wilayah laut Indonesia secara keseluruhan. Melanjutkan visi dan hasil dari Deklarasi Juanda untuk menghantarkan Indonesia sebagai negara maritim. Selain selat Malaka, penelitian ini dapat dikembangkan menjadi isu keamanan laut dengan berlandaskan ALKI. Sebuah alur laut yang telah ditetapkan sendiri oleh Indonesia yang mempunyai banyak potensi dan banyak ancaman. Banyak harapan penulis bahwa penelitian ini sekiranya dapat membantu penelitian yang lebih lanjut